

Determinan pencegahan fraud pada pemerintahan desa: *Whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan pengendalian internal

Asih Kusuma Watie*, Syamsuddin, Aditya Agung Nugraha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: asihkusumawatie0712@gmail.com)

Abstract

This study examines the influence of the whistleblowing system, good corporate governance, and internal control on fraud prevention. This field research utilised a questionnaire distribution technique with a sample of 71 respondents, comprising Village Heads, Village Secretaries, and Village Financial Officers across 24 villages in the Kajen District. The study adopted a quantitative approach with descriptive analysis. The study used random sampling and analysed the data using multiple linear regression to examine the effects of the whistleblowing system, good corporate governance, and internal control on fraud prevention. The results show that the whistleblowing system and internal control have a significant positive effect on fraud prevention. Conversely, good corporate governance does not significantly influence fraud prevention in the villages of Kajen District. Consequently, village governments should establish platforms that encourage public courage in reporting suspected fraud, strengthen internal controls, and conduct thorough evaluations of governance principles at the village level.

Keywords: Whistleblowing System, Good Corporate Governance, Internal Control, Fraud Prevention.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pengaruh *whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan teknik penyebaran kuesioner, dengan menggunakan sampel sebanyak 71 responden, di antaranya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan desa yang disebarkan kepada desa sekecamatan Kajen yang berjumlah 24 desa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *random sampling*, sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh *whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Hasil pengujian dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Sedangkan *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud di desa se-Kecamatan Kajen. Sehingga dalam pemerintahan desa perlu adanya wadah untuk masyarakat sebagai pendorong keberanian melaporkan indikasi kecurangan, juga perlunya peningkatan kualitas pengendalian internal dalam pemerintahan desa, dan penting adanya evaluasi mengenai prinsip tata kelola di tingkat desa.

Kata kunci: Whistleblowing system, Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud

How to cite: Watie, A. K., Syamsuddin, S., & Nugraha, A.A. (2026). Determinan pencegahan fraud pada pemerintahan desa: Whistleblowing system, good corporate governance, dan pengendalian internal. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 6(1), 29–42. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v6i1.2087>



1. Pendahuluan

Tatanan instansi pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah tindakan kecurangan yang merugikan banyak pihak, bertentangan dengan norma-norma sosial, menyebabkan kerugian finansial, dan juga dapat merusak reputasi. Jumlah kasus seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan penggelapan aset yang masih banyak dilakukan menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecurangan masih lemah. Karena itu, proses tata kelola organisasi yang efektif sangat diperlukan (Utama, 2022). Fraud pada sistem pemerintahan terjadi pada perilaku yang tidak beretika oleh seseorang atau sekelompok orang dalam instansi pemerintahan.

Lembaga Swadaya Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan laporan penindakan kasus korupsi selama 6 bulan, berdasarkan data yang dikumpulkan, bahwa penindakan kasus korupsi selama 6 bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Dengan nilai kerugian negara yang ikut meningkat pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun (Javier, 2021).

Di Kabupaten Pekalongan terjadi kasus fraud penyalahgunaan wewenang yang melibatkan kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Kajen. Kepala Desa Kebonagung melakukan pemberhentian permanen perangkat desa secara sepihak, di mana kepala Desa Kebonagung melakukan pemecatan tidak menggunakan surat rekomendasi dari camat. Dengan demikian, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Inspektorat Kabupaten Pekalongan menyebutkan bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran administrasi berat. Kemudian Camat Kajen menyampaikan bahwa SK pemberhentian sementara kepala desa yang terdapat pada SK Bupati Nomor 140/375 tahun 2022, tentang pemberhentian sementara kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dengan masa jabatan 2019-2025.

Dalam teori agensi, muncul karena ketidakmampuan prinsipal dalam mengelola tanggung jawab yang telah dibuat, yaitu sebuah kontrak dengan agen untuk memberikan layanan. Pihak agen lebih memilih kepentingan sendiri daripada kepentingan prinsipal, sehingga terjadi tindakan fraud. Seorang agen juga dapat melakukan tindakan kecurangan, karena memiliki rasionalisasi ekonomi sehingga dalam kondisi tersebut, akan muncul rasa niat atau rasa ingin secara pribadi (Utama & Astawa, 2022).

Seorang agen juga dapat melakukan tindakan kecurangan, karena memiliki rasionalisasi ekonomi sehingga dalam kondisi tersebut, akan muncul rasa niat atau rasa ingin secara pribadi (Utama, 2022). Untuk menciptakan pencegahan terjadinya fraud, dengan menghilangkan faktor penyebab dari adanya fraud. Pemerintahan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rosidah et al., 2023).

Usaha untuk meminimalkan terjadinya fraud, yaitu dengan penerapan sistem Whistleblowing, yang merupakan sebuah proses pengaduan yang melibatkan pegawai di dalam sebuah instansi dan juga orang lain yang menyangkut dugaan tindakan penyelewengan/pelanggaran yang terjadi atau akan terjadi di sekitar perusahaan atau

tempat mereka bekerja (Chairi et al., 2022). Dengan penerapan *sistem whistleblowing*, seseorang lebih berani menyampaikan kepada pemangku kepentingan. Juga dapat menjadi suatu pantauan atas suatu kebijakan, dengan mendapatkan informasi mengenai penyimpangan yang harus ditindaklanjuti (Andini, 2023).

Selain dengan penerapan *sistem whistleblowing*. Fraud juga dapat diminimalisir dengan adanya pengendalian internal, yaitu salah satu tindakan yang melindungi aset perusahaan dari pencurian, penipuan, dan prosedur. Pengendalian internal yang tidak efektif dapat menyebabkan adanya celah bagi pegawai untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Sistem yang sesuai kebutuhan perusahaan dan terukur dapat menjadikan perusahaan lebih mudah mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan merupakan salah satu peran utama dari pengendalian internal (Ulum, 2022). Terdapat lima komponen pengendalian internal, di antaranya adalah lingkungan kontrol, penilaian risiko, komunikasi dan informasi, dan kegiatan pemantauan Cosso, (2023).

Penerapan *Good Corporate Governance* juga merupakan salah satu tindakan pencegahan fraud, yaitu merupakan sebuah kumpulan peraturan yang mengatur atau sistem yang mengelola interaksi antara kreditor, karyawan, pemerintahan, manajemen, stakeholder, pemegang saham dengan menjalankan setiap hak dan kewajibannya (Wahyuni, 2022). Terdapat beberapa prinsip yang terdapat pada GCG, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independensi, dan Fairness* KNKG, (2006). *Good Corporate Governance* sejak lama telah menjadi pendekatan dalam hal mengurangi risiko fraud, di mana beberapa organisasi menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai salah satu cara untuk menciptakan sistem yang berintegritas, dan juga dengan penerapan yang konsisten prinsip-prinsip GCG (Sucitra et al., 2024).

Penelitian ini mengambil responden dari tiga perangkat desa yang ada di desa sekecamatan Kaje, yaitu kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan desa. Peneliti memiliki tujuan untuk membuktikan implementasi sistem whistleblowing, good corporate governance, dan pengendalian internal dalam pencegahan fraud.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Keterkaitan penelitian ini dengan teori agensi yaitu menjelaskan tentang pihak agen dan prinsipal di mana agen adalah masyarakat, dan prinsipal adalah pemerintah, dalam. Masyarakat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah. Agen yang lebih memenuhi kepentingan pribadinya menyebabkan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan, sebagai sebab dari adanya rasionalitas, tekanan dan juga kesempatan bagi agen dalam melaksanakan tugasnya (Fathia, 2022). Dengan adanya tindakan kecurangan, perlu adanya tindakan pencegahan kecurangan.

Teori keagenan juga berlaku dalam organisasi publik, di mana dalam teori ini masyarakat dianggap sebagai penerima informasi dan pemerintah daerah memiliki akses langsung terhadap informasi, sehingga dapat menyebabkan asimetri informasi. Situasi tersebut dapat memungkinkan agen melakukan fraud (Rahmadani & Sugiarto, 2023). Teori agensi menganggap bahwa dalam melakukan tindakan, pihak agen akan

lebih memenuhi kepentingan pribadinya dan menyebabkan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan, yaitu sebagai akibat dari adanya rasionalitas, tekanan, dan juga kesempatan bagi agen dalam melaksanakan tugasnya (Fathia, 2022).

Pencegahan Fraud

Terjadinya fraud menimbulkan kerugian bagi pihak lain, jika kerugian sudah terjadi dan sudah dinikmati oleh pihak tertentu, artinya pencegahan kecurangan belum terlaksana dengan baik, berbeda jika pencegahan terlaksana dengan baik maka pencegahan kecurangan sudah terlaksana dengan baik (Nugroho & Afifi, 2022). Dalam lingkungan pemerintahan, menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan mencegah fraud. Menurunkan tekanan pada pegawai untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi peluang untuk melakukan fraud, dan menghilangkan alasan untuk melakukan fraud merupakan usaha yang terintegrasi, yaitu pencegahan fraud (Noya et al., 2023). Pencegahan fraud salah satunya adalah dengan meniadakan faktor yang dapat menimbulkan terjadinya fraud.

Tindakan yang dapat mengurangi kerugian waktu yang akan datang dengan pencegahan fraud yaitu upaya penegakan hukum terhadap tindakan fraud, perbaikan sistem yang mendorong kemudahan dalam bekerja, serta peningkatan efektivitas dalam mengelola uang. Pencegahan fraud diukur menggunakan beberapa indikator, di antaranya adalah antifraud awareness yaitu suatu upaya menumbuhkan kesadaran mengenai pencegahan kecurangan, mengidentifikasi *fraud risk assessment*, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan untuk mengatasi risiko sebuah kecurangan, keefektifan pengendalian internal yaitu dengan memperkuat sistem pengendalian internal, beberapa jenis risiko bisa dideteksi, dan juga ada whistleblower sistem yaitu orang yang melaporkan pelanggaran (Dien, 2020).

Whistleblowing System

Berjalannya suatu sistem pemerintahan dengan diterapkannya sistem whistleblowing dapat mendorong seseorang untuk terhindar dari melakukan kecurangan. Dengan adanya sistem *whistleblowing*, *seseorang akan berani untuk menyampaikan aduan kecurangan dan satu pihak dengan pihak lain akan saling mengawasi melalui sistem whistleblowing*.

Whistleblowing system yang efektif diharapkan dapat mendorong aparatur pemerintah dan masyarakat lebih percaya diri dan berani melaporkan kecurangan kepada pihak yang menangani, sehingga menjadi salah satu tindakan pencegahan fraud (Chairi et al., 2022). *Whistleblowing system* diukur menggunakan indikator yaitu: Aspek struktural yaitu adanya media untuk melaporkan pelanggaran, Aspek operasional di mana adanya prosedur atau langkah-langkah yang jelas dalam sistem pelaporan, dan Aspek perawatan, yaitu merupakan sistem pelaporan pelanggaran agar dapat berkelanjutan dan bekerja dengan baik (KNKG, 2008)

Good Corporate Governance

Salah satu konsep penerapan GCG yang digunakan di sebuah organisasi/instansi untuk memastikan akuntabilitas kepada otoritas di bawah peraturan dan juga meningkatkan kinerja di dalamnya dengan memantau kinerja dan memastikan akuntabilitas kepada otoritas (Amalia & Puspitasari, 2024). Perusahaan/organisasi

melakukan pengambilan keputusan dengan penerapan tata kelola pemerintahan. Agen dalam teori keagenan mengikuti tata kelola yang baik dengan bertindak bertanggung jawab dan juga secara transparan (Elisabeth et al., 2023).

Penerapan GCG menjadi salah satu faktor untuk mencegah terjadinya fraud, dengan adanya sekumpulan peraturan yang mengatur pimpinan serta karyawan agar sesuai dengan tujuan dari sebuah organisasi, sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi dan terhindar dari penyelewengan/kasus kecurangan.

Good Corporate Governance diukur menggunakan indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan (KNKG, 2006). Beberapa organisasi/perusahaan menerapkan sistem GCGC sebagai cara untuk menciptakan sistem yang baik.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal disamakan dengan sebuah perangkat sistem kebijakan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung aset sebuah instansi/perusahaan dari semua bentuk kecurangan yang mungkin terjadi (Sari et al., 2023). Faktor yang dapat membuat pengendalian internal berfungsi bukan hanya pengendalian internal yang diterapkan saja, melainkan juga dari anggota yang ada dalam instansi tersebut. Pengendalian internal memuat langkah-langkah mekanis dengan tujuan memeriksa data administrasi dengan teliti. Dengan adanya prosedur dan kebijakan mengenai informasi yang disampaikan, yang sesuai dan juga jelas dengan yang telah ditetapkan (Rohmah & Wardani, 2023).

Dengan adanya pengendalian internal di mana tindakan keseluruhan yang bertugas sebagai pendeteksi kesalahan, penyimpangan, dan penipuan agar dapat melindungi semua aset dengan pembatasan akses oleh pihak tertentu yang berwenang, dapat meminimalisir terjadinya fraud (Wahyuni, 2022). Pengendalian internal diukur menggunakan serangkaian indikator seperti lingkungan kontrol, penilaian risiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian (Commission Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 2023).

Whistleblowing system dan pencegahan fraud

Sebagai wadah bagi pelapor pelanggaran, *sistem whistleblowing adalah upaya melacak tindakan kecurangan atas* ajuan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam teori agen akan menumbuhkan upaya untuk memiliki keuntungan sendiri, dan dengan adanya sistem whistleblowing, para pegawai merasa diawasi oleh pegawai yang lain, karena tidak semua orang tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga dengan adanya sistem whistleblowing dapat mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2022) menghasilkan temuan bahwa sistem whistleblowing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Maka hipotesis bisa dinyatakan:

H1: *Whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

Good Corporate Governance dan pencegahan fraud

Good corporate governance dibuat dengan tujuan sebagai peningkatan kinerja sebuah organisasi dengan cara memastikan akuntabilitas manajemen dan kinerja manajemen (Ansori, 2022). Menetapkan tata cara pengelolaan suatu instansi yang tepat merupakan salah satu upaya pencegahan tingginya intensitas kecurangan yang akan terjadi.

Berkenaan dengan masalah keagenan, di mana seorang agen dan principal pasti mempunyai rasa niat secara pribadi dari organisasi, oleh sebab itu pengelola organisasi harus mengontrol dan mengendalikan agar kegiatan dalam pengelolaan organisasi berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (Sutisna et al., 2024)(Utama, 2022). Menurut teori keagenan, karena dalam sebuah organisasi perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap organisasi yang sedang berjalan, GCG menjadi bagian penting dalam mengolah sebuah organisasi, agar terselenggara sesuai peraturan yang ada, dengan diterapkannya GCG dapat mempermudah pemerintah (Rahmadani & Sugiarto, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Afifi, 2022) Hasil menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Sehingga hipotesis bisa dinyatakan:

H2: *Good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Pengendalian internal dan pencegahan fraud

Pengendalian internal perlu dilakukan sebagai salah satu pengawasan untuk aktivitas sebuah perusahaan agar mencapai tujuan operasionalnya merupakan salah satu usaha untuk mencegah terjadinya fraud (Hanurani & Jaeni, 2022). Pengendalian internal yang efektif akan membentuk sistem manajerial yang aman dan menjadikan peluang terjadinya fraud berkurang. Teori keagenan juga menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan pengendalian internal untuk mengurangi asimetri informasi, tindakan kecurangan bisa diminimalisir saat asimetri informasi berkurang di suatu organisasi, yaitu dengan meningkatkan pengendalian internal (Rahmadani & Sugiarto, 2023). Dari penelitian yang dilakukan oleh (Destiyana et al., 2024) Menghasilkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini bisa dinyatakan sebagai berikut:

H3: Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di desa sekecamatan Kajen, mencakup kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan desa, dengan jumlah desa sebanyak 24. Diperoleh responden sebanyak 72 melalui teknik *random sampling*. Data yang dapat diolah sebanyak 71, sedangkan 1 data tidak memenuhi syarat.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu *whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan pengendalian internal, sedangkan variabel dependen

dalam penelitian ini adalah pencegahan fraud. Analisis data diawali dengan uji statistik deskriptif untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, dilakukan uji validitas untuk mengetahui tingkat kesesuaian alat ukur yang digunakan dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu menghasilkan data yang konsisten. Penelitian ini juga menggunakan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen, uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal, serta uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antarpengamatan.

Selanjutnya, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sedangkan uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pencegahan fraud secara parsial. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Adapun model penelitian sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana, Y merupakan pencegahan fraud; X1 merupakan *Whistleblowing System* sebagai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran atau fraud; X2 merupakan *Good Corporate Governance* sebagai prinsip tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar; X3 merupakan pengendalian internal sebagai mekanisme untuk mencegah dan mendeteksi fraud; serta e merupakan *error term*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Tabel 1. Uji Validitas

Y	r hitung	X1	r hitung	X2	r hitung	X3	r hitung
Y.1	0,524	X1.1	0,731	X2.1	0,510	X3.1	0,690
Y.2	0,699	X1.2	0,671	X2.2	0,677	X3.2	0,463
Y.3	0,743	X1.3	0,651	X2.3	0,727	X3.3	0,714
Y.4	0,388	X1.4	0,761	X2.4	0,694	X3.4	0,397
Y.5	0,451	X1.5	0,646	X2.5	0,550	X3.5	0,712
Y.6	0,542	X1.6	0,696	X2.6	0,651	X3.6	0,649
Y.7	0,616	X1.7	0,505	X2.7	0,552	X3.7	0,595
Y.8	0,643	X1.8	0,709	X2.8	0,693	X3.8	0,661
Y.9	0,608	X1.9	0,545	X2.9	0,524	X3.9	0,673
				X2.10	0,558	X3.10	0,719
				X2.11	0,534	X3.11	0,736
				X2.12	0,574	X3.12	0,807

Berdasarkan Tabel 1, pernyataan valid karena memenuhi syarat validitas, yaitu $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ (0,2335), dengan taraf signifikansi 5%.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Standar Cronbach's Alpha	Keterangan
Pencegahan Fraud	Y	0,756	0,6	Reliabel
<i>Whistleblowing System</i>	X1	0,832	0,6	Reliabel
<i>Good Corporate Governance</i>	X2	0,841	0,6	Reliabel
Pengendalian Internal	X3	0,876	0,6	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2, uji reliabilitas dari variabel *Whistleblowing System*, *Good Corporate Governance*, dan *Pengendalian Internal* memiliki nilai koefisien variabel atau Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas – *One Sampel Kormogrov – Smirnov Test*

Sig.	Unstandardized Residual
Asymp. Sig (2-tailed)	0,088

Data pada Tabel 3 dapat disimpulkan, di mana nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,088. Berarti bahwa $0,088 > 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa normalnya data penelitian yang telah didistribusikan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
<i>Whistleblowing System</i>	0,768	1,302
<i>Good Corporate Governance</i>	0,597	1,675
Pengendalian Internal	0,548	1,824

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel independen, yaitu *Whistleblowing System*, *Good Corporate Governance*, dan *Pengendalian Internal*, memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas - Spearman's Rho

Instrumen	Sig.
<i>Whistleblowing system</i>	0,554
<i>Good Corporate Governance</i>	0,904
Pengendalian Internal	0,632

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada *whistleblowing system* $0,554 > 0,05$, *Good Corporate Governance* $0,904 > 0,05$, dan *Pengendalian Internal* $0,632 > 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 10,426 dapat diartikan bahwa jika tidak ada kenaikan atau penurunan dari nilai variabel independen, maka pencegahan fraud bernilai 10,426. Nilai koefisien *Whistleblowing system* (X1) sebesar 0,369 bertanda positif. Maka, jika variabel *whistleblowing system* mengalami

kenaikan satu satuan, maka pencegahan fraud akan naik sebesar 0,369. Nilai koefisien *Good corporate governance* (X2) sebesar 0,068 memiliki tanda positif, menunjukkan bahwa jika *good corporate governance* mengalami kenaikan satu satuan, maka pencegahan fraud akan naik sebesar 0,068. Nilai koefisien pengendalian internal (X3) sebesar 0,216 memiliki tanda positif. Jika variabel pengendalian internal mengalami kenaikan satu satuan, maka pencegahan fraud akan naik sebesar 0,216.

Tabel 6. Uji analisis regresi linier berganda

Model	Koefisien	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	10,426	3,482	2,994	0,004
X1 (<i>Whistleblowing System</i>)	0,369	0,074	4,958	0,000
X2 (<i>Good Corporate Governance</i>)	0,068	0,079	0,864	0,390
X3 (Pengendalian Internal)	0,216	0,076	2,842	0,006

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji parsial dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel *whistleblowing system* (X1) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ serta nilai t hitung $4,958 > t$ tabel 1,996. Nilai yang telah didapat mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Variabel *good corporate governance* mempunyai nilai signifikansi yaitu $0,390 > 0,05$ dan t hitung $0,864 < 1,996$ t tabel. Dengan demikian, disimpulkan bahwa *good corporate governance* secara parsial tidak dapat memengaruhi pencegahan fraud secara signifikan; maka (H2) hipotesis kedua ditolak. Selanjutnya variabel pengendalian internal mendapatkan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ dan t hitung $2,842 > 1,996$ t tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud secara parsial. Menyimpulkan (H3): hipotesis ketiga diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,735	0,540	0,519

Tabel 7 menunjukkan nilai Adjusted R Square 0,519 atau 51,9%. Dapat ditunjukkan bahwa 51,9% dari pencegahan fraud dapat dipengaruhi oleh *whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan pengendalian internal. Kemudian, sebesar 49,1% lainnya mendapat pengaruh dari variabel independen lain di luar pembahasan penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Fraud

Hasil yang didapatkan dari uji t menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* (X1) mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap pencegahan fraud. Kesimpulannya, sistem *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, pemerintah selaku agen dan masyarakat sebagai prinsipal, sehingga dengan adanya *whistleblowing system* akan menjadi

pengawasan terhadap pemerintah agar bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya karena adanya potensi pengawasan dan pelaporan dari berbagai pihak.

Pemerintah desa di Kecamatan Kajen memiliki kebijakan yang tertulis tentang sistem pelaporan pelanggaran dan pemerintah desa di Kecamatan Kajen mengamankan informasi dan data yang masuk dari pelapor pelanggaran serta melakukan evaluasi rutin terhadap berjalannya sistem pelaporan pelanggaran. Dengan adanya implementasi sistem whistleblowing yang baik, dapat diwujudkan komitmen kuat pemerintah untuk membersihkan pemerintah dari perilaku penyimpangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhyaar et al. (2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Suputra (2021) semakin baik whistleblowing system akan meningkatkan pencegahan fraud.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil uji t, variabel *good corporate governance* (X2) menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini bertolak belakang dengan teori agensi, di mana seorang agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, yaitu dengan diterapkannya prinsip *good corporate governance* yang efektif, sehingga tata kelola yang baik akan mencegah fraud. Karena sangat penting dalam suatu pemerintahan dengan pengelolaan terkontrol dan terkendali, memastikan pengelolaan suatu pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Terdapat hal yang menyebabkan tidak berpengaruhnya *Good corporate governance* salahsatunya pada pencegahan fraud di Desa Se-Kecamatan Kajen yaitu tidak terlaksanakannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan maksimal dalam pemerintahan desa, *good corporate governance* hanya menjadi formalitas tanpa adanya dampak yang nyata, yang mengakibatkan seharusnya *good corporate governance* menjadi pencegahan fraud, justru tidak mampu menjalankan perannya dengan efektif, dengan ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak cukup, yang paling penting ialah bagaimana *good corporate governance* benar-benar dijalankan pada pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adiko et al., 2019) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, juga penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Puspitasari, 2024) Yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan uji t, variabel pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil ini mendukung teori agensi yang menyatakan semakin baik pengendalian internal, semakin baik juga pencegahan fraud. Dengan kebijakan yang ditetapkan, yaitu sebagai kontrol atau pengawasan, jika melemah, maka akan mengakibatkan perbedaan kepentingan antara principal dengan agen sehingga

memunculkan masalah keagenan, di mana pihak agen lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada pihak lain (principal), dan dapat menimbulkan pelanggaran/kecurangan. Selain itu, Desa di Kecamatan Kajen telah menerapkan prosedur pengendalian internal dengan baik, dilihat dari aspek pengendalian internal seperti pembagian dan pemahaman tugas dan wewenang masing-masing, serta pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Terjadinya fraud dapat dicegah dengan penerapan pengendalian internal yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Adi Sucipta, (2022) Yang menunjukkan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Qorirah & Syofyan, (2024) dan Kamila et al. (2024) Penelitian menghasilkan temuan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Fraud dapat dicegah jika pengendalian internal dilaksanakan dengan baik.

Kehadiran peneliti secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di desa-desa di Kecamatan Kajen, selama proses pengisian kuesioner dengan tujuan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap tingkat pemahaman responden, meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan, serta meminimalkan risiko bias atau manipulasi data oleh pihak yang terkait.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, *sistem whistleblowing* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam upaya pencegahan *fraud*. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang efektif, praktik kecurangan dapat diminimalisir. *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian yang kuat dan diterapkan dengan baik mampu mengurangi peluang terjadinya kecurangan.

Fraud: fokus utama harus diberikan pada penguatan sistem *whistleblowing* dan pengendalian internal di tingkat desa. Adanya sistem pelaporan yang baik menciptakan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sehingga pemerintah desa didorong untuk lebih bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya sesuai aturan. Sementara itu, meskipun GCG secara teori diharapkan berperan, dalam konteks studi empiris ini, implementasinya mungkin belum secara langsung berdampak signifikan terhadap pencegahan. *Fraud* di desa-desa tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memoderasi pengaruh GCG atau bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat lebih efektif diimplementasikan di tingkat pemerintahan desa.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para aparaturnya desa di desa sekecamatan Kajen yang telah memberikan waktu dan memberikan kontribusi dalam penelitian yang dilakukan melalui pengisian kuesioner yang telah disediakan penulis. Serta banyak

pihak yang membantu tercapainya pelaksanaan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Referensi

- Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafsah, H. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Etika Auditor, dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud PT Inalum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(1), 52–68. <https://doi.org/10.30596/jakk.v2i1.4436>
- Akhyaar, K., Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Amalia, M., & Puspitasari, E. (2024). Analisa Pencegahan Kecurangan Ditinjau dari Penerapan Good corporate governance, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing system. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2), 423–438. <https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.355>
- Andini. (2023). Pengaruh Whistleblowing, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Internal Control System Terhadap Pencegahan Fraud Dana Psr. *Jurnal Agro Indragiri*, 9(2), 44–48. <https://doi.org/10.32520/jai.v9i2.2581>
- Ansori, D. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 349–354. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i1.35>
- Chairi, N., INDRIANI, M., & DARWANIS, D. (2022). Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119–142. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12655>
- Commission Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway. (2023). Achieving effective internal control over sustainability reporting (ICSR): Building Trust and Confidence through the COSO Internal Control —Integrated Framework. *COSO-ICSR Report*, 1–114.
- Destiyana, A., Yassarah, F. S., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 27–39. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2528>
- Dien, R. N. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoritis dan Empiris*. Deepublish.
- Elisabeth, D. M., Butar Butar, E. A., & Saragih, R. br. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Kabupaten Samosir. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 5(2), 118–127. <https://doi.org/10.36985/rmmmyrc67>
- Fathia, J. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralita Individu sebagai pemoderasi (Studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 455–468.

<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>

- Hanurani, N. Y., & Jaeni. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Karyawan Dalam Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda)). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 38–48. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.596>
- Javier, F. (2021). *ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. TEMPO. <https://www.tempo.co/data/data/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya-997028>
- Kamila, Z., Hartanto, R., & Maemunah, M. (2024). Pengaruh Kejujuran dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 75–81. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11860>
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*. Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
- Noya, J., Wilhelmina Silooy, R., & Benony Limba, F. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Saparua). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 278–292. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1432>
- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Qorirah, N. F., & Syofyan, E. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(1), 82–96. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i1.53>
- Rahmadani, S., & Sugiarto. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *STIE Cendekia Karya Utama*, 5(1), 47–64. <https://doi.org/10.70375/e-logis.v5i1.5>
- Rohmah, N., & Wardani, M. K. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Atas Dana Desa (Studi di Desa Kabupaten Sragen). In *Disertasi*. Uin Raden Mas Said Surakarta.
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Sari, N. K. I. Y., Sumadi, N. K., & Endra Lesmana Putra, N. M. (2023). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Penegakan Hukum terhadap pencegahan kecurangan (FRAUD) pada Lembaga Perkreditan Desa

- (LPD) Se-Kecamatan Kerambitan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 278–289. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i3.3265>
- Sucipta, W. G., & Dewi, N. A. W. T. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance (GCG) Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bumdes Di Kecamatan Kintamani. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(3), 537–547. <https://doi.org/10.23887/jap.v15i03.42059>
- Sucitra, I. D., Pratiknjo, M. H., & Kawung, E. J. . (2024). Konstruksi Sosial Dalam Jalinan Hubungan Friends with Benefits (Studi Pada Anak Muda di Kota Manado). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68. <https://doi.org/10.56015/gjiklp.v10i3.134>
- Suputra, A. (2021). Pengaruh Penerapan Audit Internal, Whistleblowing Sistem, dan Surprise Audit Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatu. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 24, 310–324. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2021>
- Sutisna, D., Nirwansyah, M., Ningrum, S. A., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi pada Konteks Berbagai Issue di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4802–4821. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12973>
- Ulum, S. N. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- Utama, K. D. S. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi, Good Corporate Governance, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(01), 56–67. <https://doi.org/10.23887/vjra.v10i01.56315>
- Utama, K. D. S., & Astawa, I. G. P. B. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi, Good Corporate Governance, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(01), 56–67. <https://doi.org/10.23887/vjra.v10i01.56315>
- Wahyuni, S. (2022). Analisis good corporate governance, pengendalian internal, dan whistleblowing system dan fraud. *Journal of Business and Banking*, 12(1), 125. <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260>